

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara dengan produsen karet alam terbesar di dunia. Karet alam memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa negara melalui ekspor. Dengan menurunnya harga karet alam di pasar internasional tentu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Dalam menyikapi turunnya harga karet alam, Indonesia bersama dengan Thailand dan Malaysia yang tergabung dalam ITRC melakukan skema kerja *Demand Promotion Scheme (DPS)*, *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)*, dan *Supply Management Scheme (SMS)*. Kebijakan AETS dalam membatasi ekspor karet alam menjadi tujuan utama dalam meningkatkan kembali harga karet alam yang berdampak terhadap ekspor karet alam Indonesia.

Dalam pelaksanaan skema kerja dari ITRC tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk melakukan peremajaan sebanyak 700 ribu hektar perkebunan karet. Dari banyaknya perkebunan karet yang dilakukan peremajaan, rata-rata perkebunan tersebut adalah perkebunan rakyat yang pohon karet alamnya sudah tua. Pada implementasinya kebijakan SMS dalam melakukan peremajaan karet alam tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran dari Pemerintah Indonesia dalam melakukan peremajaan. Di sisi lain, para petani juga kurang memberikan dukungan terhadap program peremajaan karet alam karena para petani lebih memilih untuk menyadap karet alam miliknya dibandingkan dengan harus menunggu perkebunan karetnya yang diremajakan sampai dapat dilakukan penyadapan.

Kebijakan pembatasan ekspor karet alam atau AETS berdampak terhadap ekspor karet alam Indonesia. Kebijakan ini yang harapannya dapat meningkatkan harga karet alam yang sebelumnya menurun malah berdampak terhadap menurunnya jumlah ekspor karet alam Indonesia. Pada implementasinya pembatasan ekspor karet alam tidak membuat harga karet alam menjadi naik atau

cenderung fluktuatif. Hal ini membuat kebijakan dari ITRC untuk membatasi ekspor karet alam dianggap gagal untuk meningkatkan harga karet alam. Pembatasan ekspor karet alam keempat yang dilakukan pada tahun 2016 membuat nilai karet alam Indonesia menurun. Akan tetapi pada tahun 2017 tidak dilakukannya pembatasan ekspor karet alam terjadi peningkatan terhadap kuantitas dan nilai ekspor karet alam. Pada tahun 2018 dilakukan kebijakan AETS kelima membuat volume dan nilai karet alam menurun dan Pada tahun 2019 dilakukan kembali kebijakan AETS keenam membuat volume dan nilai karet alam kembali menurun dari tahun 2019.

Kebijakan pembatasan ekspor karet alam tidak semata-mata buruk terhadap perkembangan karet alam Indonesia. Dengan adanya pembatasan membuat karet alam yang seharusnya diekspor dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri. Melalui kebijakan DPS dalam meningkatkan konsumsi karet alam domestik dapat membuat Indonesia lebih menyerap karet alam menjadi barang jadi seperti ban, alas kaki, sarung karet, komponen teknologi, komponen otomotif, campuran aspal. Hal ini akan lebih memiliki nilai dibandingkan dengan langsung melakukan ekspor karet alam mentah ke negara lain.

6.2. Saran

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan ITRC terhadap ekspor Indonesia mungkin dapat memperhatikan bagaimana dampak lanjutan akibat dari adanya Covid-19. Peneliti selanjutnya akan lebih memperhatikan bagaimana proses pengambilan data terhadap instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Sehingga penelitian mendapatkan variasi data dari berbagai sudut pandang yang tentunya akan menjawab kurangnya dari penelitian ini.